BAB III

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi kitab-kitab fiqih dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini yaitu suatu analisis pendapat empat mazhab tentang wali nikah yang dituangkan di dalam bab II dalam skripsi ini, maka langkah berikutnya penulis akan menganalisa data yang telah penulis kumpulkan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diketahui bahwa antara Mazhab Imam Abu Hanifah dan Mazhab Imam yang tiga memiliki perbedaan pandangan mengenai wali dalam pernikahan ini.

Pada pembahasan pada bab II diketahui bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan itu bukan merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan, sedangkan menurut tiga imam mazhab lainnya wali dalam pernikahan itu termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan. Padahal kalau kita sadari semua diantara empat mazhab tersebut diatas berpendapat bahwa wali harus ada di dalam pernikahan tetapi yang membedakan adalah kondisi wanita tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah hanya wanita yang masih kecil atau gila yang memerlukan wali sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal semua wanita apabila menikah harus dengan walinya tanpa melihat keadaan wanita tersebut dan status wanita tersebut, tetapi mengenai perizinannya Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali membedakan antara wanita yang gadis dan yang janda. Seorang wanita yang gadis tidak perlu

dimintai persetujuannya, dan diamnya dianggap persetujuannya. Sedangkan wanita yang janda, wali tidak boleh memaksanya menikah dan harus mendengarkan pernyataan persetujuannya.

Imam Abu Hanifah dan Imam yang tiga yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat demikian karena mempunyai metode istinbat hukum masing-masing. Metode istinbath hukum adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menetapkan hukum islam. Istinbath ini sangat berkaitan dengan ushul fiqh karena ushul fiqh adalah hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum yang bersumber dari al qur'an dan hadist. Setiap imam mazhab mempunyai cara atau metode masing-masing dalam menetapkan suatu hukum. Seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, Imam Abu Hanifah mempunyai tujuh metode istinbath hukum yaitu Alqur'an, Sunnah, fatwa Sahabat, ijma', qiyas, istihsan, dan urf.

Mengenai wali nikah ini Mazhab Hanafiyah menggunakan tiga metode istinbat hukum yaitu Al qur'an, hadis, dan qiyas. Seperti mazhab yang lain Mazhab Hanafi menggunakan Al qur'an sebagai landasan pertama tetapi hanya saja berbeda penafsiran ayat dan istinbath hukumnya. Imam Malik juga menggunakan ayat al qur'an sebagai landasan hukumnya, dan hadist nabi. Landasan yang menjadi pegangan Imam Maliki juga sama dengan dua imam yang lain yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, ini karena sangat berdekatan cara istibath mereka.

Berikut akan dijelaskan perbedaan dan sebab perbedaan pendapat dari keempat mazhab:

a. Perbedaan empat mazhab tentang wali dalam pernikahan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan itu tidak wajib ada atau sunnah saja. Ini karena seorang wali tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan. Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa ayat-ayat yang mereka gunakan itu menunjukkan bahwa pelaku nikah adalah perempuan itu sendiri, baik janda maupun bukan. Ditambah lagi mereka menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi “ perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Perempuan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya”.

Meskipun konteks ayat Al Qur'an maupun hadis nabi tersebut terjadi pada kasus janda, tetapi pendapat ini mengemukakan argument analogi (qiyas) yaitu bahwa gadis dewasa sebenarnya sama dengan janda. Kesamaannya adalah terletak pada sisi kedewasaannya. Jadi bukan pada status gadis atau jandanya. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati dan pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka, tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.¹ Sedangkan menurut tiga Imam lainnya perwalian itu di dasarkan pada illat hukum gadis (al-bikarah). Oleh

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayattul Al – mujtahid*,(Jakarta: Pustaka Amani, 1989) jilid 2. h.11 - 12

karena itu perempuan perawan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya.²

Bagi penganut Mazhab Hanafiyah perempuan dewasa dianggap mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan seperti perdagangan. Oleh karena itu adalah logis jika dia juga mampu melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya, atas dasar itu maka hak untuk menentukan jodoh dan melakukan perkawinan adalah hak pribadi perempuan.³ Bisa jadi karena alasan itulah Mazhab Hanafiyah mengqiyaskan akad pernikahan dengan akad transaksi-transaksi perdagangan.

Mazhab Hanafi ini membolehkan wanita yang merdeka, baligh, dan berakal menikah tanpa adanya wali, seperti yang sudah disebutkan diatas hanya anak kecil dan yang gila yang memerlukan seorang wali di dalam pernikahan, selain itu wali dapat membatalkan sebuah pernikahan anak perempuannya jika diketahui bahwasannya calon suami si anak perempuan tadi tidak sekuat dengannya dan mahar yang kurang dari mahar mitsil. Sesuai dengan syarat pernikahan yang benar menurut Ulama Hanafiyah yaitu bahwasannya masing – masing dari kedua mempelai harus mempunyai kapasitas sempurna jika

² Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara* (Yogyakarta : Pusat Studi Gender, 2005)h. 155

³ Abdurrahman al – Jaziri, *al Fiqh 'ala Madzahib al – arba'ah juz iV*, h. 50. Lihat juga Tutik Haniddah, *Fiqh Perempuan berwawasan keadilan Gender*(Malang :UIN Maliki Presss, 2011)h.99

melaksanakan akad nikah sendiri. Kapasitas sempurna itu adalah berakal. Baligh dan merdeka.⁴

Menurut pendapat Imam Malik wali tidak dipertegas apakah harus ada atau tidak di dalam sebuah pernikahan tetapi menurut Mazhab ini seorang perempuan tidak diperbolehkan mengucapkan akad sendiri, ini artinya harus ada seorang pendamping untuk membantunya mengucapkan akad tersebut. Dan di dalam kitab *Bidayat wa Nihayat al-Muqtasid*. Ibnu Rusyd menerangkan berdasarkan riwayat Syihab, Maliki berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah.⁵

Dari isi kitab itu sudah jelas bahwa Imam Malik sependapat dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa wali dalam pernikahan itu haruslah ada. Imam Syafi'i berpendapat wali merupakan syarat dan rukun dari pernikahan dan apabila wali tidak ada maka nikahnya batal, pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

b. Sebab Perbedaan Pendapat Empat mazhab

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka disini dapat diketahui sebab mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam yang tiga yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu jil. 9*, terj. Abdul Hayyie, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011) h.86

⁵ Abdul Walid Muhammad Ibn hmad Ibn Muhammad Ibn rusyd, al – Faqqih, *Bidayah al Mujthid wa Nihayah al – Muqtasid*, bairut : da al – jiiil, Juz 2, 1409H/1989M.h.6

Ahmad bin Hanbal tentang adanya wali dalam pernikahan. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan metode istinbath hukum empat mazhab tersebut.

Istimbat artinya mengeluarkan hukum dari dalil⁶. Imam mazhab sepakat bahwa alquran dan sunnah merupakan sumber dan dalil pokok hukum islam. Namun ada hal yang membedakan untuk menafsirkan ayat atau memahami kandungan ayat yang terdapat di dalam alquran karena alquran bersifat global. Lafaz alquran adalah qath'i al wurud yang mana lafaz alquran pasti dari Allah SWT dan tidak ada campur tangan dari makhlukNya. Berbeda dengan makna dan kandungan ayatnya ada yang bersifat qath'i ad dalalah dan ada yang bersifat zhanni ad dalalah maka dalam penafsiran ayat dan memahami kandungan ayat di perlukan ilmu lain sebagai penunjang seperti ushul fiqh atau ilmu lainnya.

Cara penggalan hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan yaitu pendekatan lafaz dan pendekatan makna pendekatan lafaz adalah penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus mengetahui dalalahnya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti qiyas, istishan, masalah mursalah urf dan lain-lain.⁷

Nash disini tidak hanya ayat al quran saja tetapi juga hadits. Mengenai ayat al qur'an yaitu Q.S Al Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ٢٣٢

⁶Asjmuni A. Rahman, *metode hukum islam*, (Jakarta: bulan bintang 1986),h.175

⁷Syamsul Bahri dkk. *Metodelogi hukum islam*,(Yogyakarta:TERAS cetakan pertama,2008) hal. 55

232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Lafaz **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** menurut Mazhab Hanafi ditunjukkan kepada wali bahwa seorang perempuan apabila sudah dipinang atau sudah suka dengan lelaki itu maka tidak boleh seorang wali ikut campur dalam perkawinannya sebagai petunjuk dibolehkannya seorang gadis menikah tanpa adanya wali.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali juga menunjukkan lafaz itu kepada wali tetapi berbeda maksudnya. Memang sama dengan larangan untuk tidak menghalang – halangi tetapi disini ada sebuah peran wali yang mana wanita harus meminta izin kepada walinya, sesuai dengan asbabul nuzul ayat tersebut bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki – laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahny mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki – laki itu bersama Umar bin Khatab untuk meminangnya. Maqil menjawab : hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, yang berisikan bahwa wali dilarang untuk mengahalng – halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu maka Ma'qil berkata : aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil oraang itu dan

berkata : aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau (HR Bukhori, Abu daud, dan Turmudzi)⁸

Kemudian dengan hadits

لَأَيِّمٌ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْنَدُ فِي نَفْسِهَا وَإِدْنُهَا صُمَائُهَا⁹

Mazhab Hanafi mengartikan lafaz الأَيِّمُ disini adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda. Kemudian lafaz أَحَقُّ بِنَفْسِهَا itu menunjukkan bahwasannya wanita memiliki hak penuh atas dirinya untuk melakukan apapun bahkan akad sekalipun. Maka dari itu Mazhab Hanafiyah ini mengqiyaskan akad transaksi seperti akad nikah. Akan tetapi, kalangan dari Mazhab yang lainnya mengartikan bahwasannya kata الأَيِّمُ ditunjukkan untuk seorang janda dan maksud dari lafaz أَحَقُّ بِنَفْسِهَا artinya seorang janda boleh menerima atau menolak perjodohan atau pinangan seseorang dan wali tidak berhak untuk memaksanya.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menggunakan ayat al qur'an, hadis dan qiyas, sedangkan Imam malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal meenggunakan juga menggunakan ayat al qur'an dan juga hadis tetapi berbeda ayat dan hadisnya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal cukup dengan menggunakan ayat al qur''an dan hadits karena menggunakan pendekatan lafaz yang tidak perlu metode lain untuk memahami aya tersebut, di samping itu cara beristibath hukum adalah dengan mencari di dalam Al qur'an

⁸ Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro), 1984, h. 78.

⁹ Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara''i*, cet.2.....h. .300

dan hadits yang menjadi sumber ashol beristidlalnya, artinya apabila suatu kasus yang sudah ditemukan hukumnya di dalam Al Qur'an dan hadits maka mazhab ini tidak perlu lagi menggunakan ijma' maupun qiyas.

Terlihat sekali ada perbedaan dalam penafsiran ayat Al Qur'an . dalam penafsiran sebuah ayat Al Qur'an bahkan bertolak belakang antara satu dengan lainnya. Apabila kita lihat dari asbabul nuzul itu jelas bahwa apabila wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu dan Mu'qil tidak dapat menghalang – halangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan. ini berarti bahwa seorang wali merupakan rukun atau syarat sah sebuah pernikahan.¹⁰

Ayat tersebut menguatkan pendapat bahwasannya tidak sah pernikahan tanpa wali, sebab Allah telah melarang para wali untuk menghalangi mereka menikah. Jika seorang wanita mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri maka larangan ayat tersebut tidak memiliki makna, sebab kapanpun mereka menghendaknya, bisa saja menikahkan dirinya sendiri dan dalam hal ini tidak ada yang bisa menghalangi mereka.¹¹ Melihat dari asbabul Nuzul tersebut sangatlah berbeda dengan penafsiran Imam Abu Hanifah.

Memang dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah sangat dipengaruhi oleh perkembangan Hukum di Kufah (Irak), yang letaknya jauh dari madinah (Hijaz). Madinah adalah tempat tinggal rasul dan sahabat yang selalu memelihara dan menerapkan sabda – sabda rasul serta mewariskan kepada

¹⁰ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Dina Utama, 1993).h. 67

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabrani, *Tafsir At Thabrani* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009) h. 969

generasi – generasi selanjutnya (para tabi'in). Sedangkan Kufah adalah suatu tempat yang sangat kurang pembedaharaan haditsnya, ini karena letak Kufah berada di tengah kebudayaan Persia yaitu kondisi masyarakatnya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Banyak problematika baru yang muncul saat itu dan tidak ada di zaman nabi atau zaman sahabat dan tabi'in. Maka mengatasi problematika yang timbul beliau memerlukan ijtihad atau ra'yu. Perbedaan tempat tinggal adalah perbedaan yang sangat menonjol yang menyebabkan berbedanya pendapat antar mazhab. Seperti di dalam kaidah fikih yang berbunyi :

لا يترك تنغير الأحكام بتغير الزمان والمكان و الأحوال¹²

Artinya : “Tidak dipungkiri bahwasannya berubahnya hukum tergantung dengan berubahnya zaman, waktu dan keadaan”

Kaidah inilah yang menjadikan Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa adanya wali perempuan karena melihat kondisi perempuan – perempuan di Bagdad yang dianggap sudah cukup pengetahuannya tentang laki-laki yang ingin menikahinya karena Baghdad pada waktu itu mengalami masa “terbuka” di mana perempuan dan laki-laki bisa belajar dan beraktifitas bersama. Lain halnya dengan yang ada di Madinah bahwa ada sekat yang tidak boleh dilanggar dalam pergaulan laki – laki dan perempuan.

Selain karena alasan diatas ada alasan lain yaitu Imam Abu Hanifah juga tidak menerima hadis yang berbunyi لا نكاحا اىلا بى ولىيىن karena dinilai tidak memenuhi syarat hujjah. Menurut beliau hadist yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis yang mencapai tingkat mutawatir. Hadits mutawatir yaitu hadis yang tidak mungkin ada terdapat penipuan atau kebohongan di dalamnya,

¹² Ajsmuni A.Rahman, *Qawaidah – qa'idah fiqih, cet ke-1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)h. 175

sedangkan hadis tersebut menurut mereka adalah hadis ahad. Padahal, perkawinan itu menyangkut kepentingan orang banyak dan sesuatu yang menyangkut orang banyak tidak mungkin disampaikan kepada seorang sahabat. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadits ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir, keadaan perawi seperti ini terjadi sejak perawi pertama sampai perawi terakhir.

Jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan maqbul hukumnya wajib. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad memakai hadis ahad bila syarat – syarat periwayatannya yang shahih telah terpenuhi, akan tetapi, Imam Abu Hanifah menetapkan syarat tsiqah dan adil bagi perawinya dan amaliyahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Adapun Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalahi amalan ahli Madinah.¹³

Wajar saja Imam Abu Hanifah tidak menerima suatu hadis karena Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang terkenal dengan ra'yu yaitu golongan yang memakai ilat-ilat hukum dan menetapkan hukum dengan menggunakan daya akal. Dengan demikian apabila mendapati suatu keganjalan di dalam suatu hadis maka Imam Abu Hanifah menggunakan ra'yu karena beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan hadits yang ditakutkan akan terjadi pemalsuan hadis mengingat tempat tinggal Imam Abu Hanifah yang jauh dari Madinah.

¹³ Mudasir, Ilmu hadis (Pustaka Setia ; Jakarta, 1999)h.126

Ada bentuk nafi pada kata laa dalam kalimat laa nikaahan illa biwaliyyin yang artinya tidak menurut jumhur ulama mengandung pengertian tidak sah tetapi ulama hanafiyah mengartikan laa nafiyyah tersebut dengan arti tidak sempurna, karenanya hanya dianjurkan saja dan tidak diwajibkan. Dengan begitu hadis diatas mengandung pengertian bahwa tidak sempurna pernikahan tanpa seorang wali. Dalam konteks hukum tidak sempurna berarti wali bukanlah syarat sah, dengan kata lain disunahkan. Maka dari itu suatu pernikahan apabila tidak dihadiri seorang wali tetap saja sah pernikahannya.¹⁴

Sudah kita ketahui bahwa Imam Malik sependapat dengan Imam Syafii'i dan Imam Hanbali. Tetapi, Mengenai persetujuannya Imam Malik membedakan antara gadis maupun janda yaitu untuk seorang janda harus ada persetujuan yang tegas sebelum melakukan akad sedangkan untuk gadis ataupun janda yang belum dewasa atau yang belum pernah dicampuri maka apabila ayah bertindak sebagai wali maka ia memiliki hak ijbar atau hak paksa. Hak ijbar merupakan sesuatu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang yang disebut wali mujbir. Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.¹⁵

Mengenai hak ijbar masing – masing mazhab membedakan orang yang berhak menjadi wali mujbir:¹⁶

¹⁴ Ali Ibn 'Umar Al-Daruqutni, *Sunanu Al-Daru Qutni, Juz IV*, (Beirut-Lebanon: Aresalah Pubisher, 2004), 322-323

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum islam jilid 4* (PT Ictiar Baru Van Hoeve : Jakarta, 1996) hal. 1337

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Pena Pundi Aksara : Jakarta Pusat, 2006) hal.

1. Dari Mazhab Hanafi

- a. Anak laki – laki sampai kebawah
- b. Ayah, kakek (ayah dari ayah)
- c. Saudara laki – laki kandung, saudara laki – laki seayah, kemudian anak laki – laki mereka sampai ke bawah
- d. Paman (saudara ayah kandung, paman ayah, anak laki – laki mereka sampai ke bawah

2. Mazhab Maliki

- a. Pemilik hamba sahaya terhadap hambanya
- b. Ayah, baik cerdas maupun tidak
- c. Orang yang diberi wasiat oleh ayah apabila ayah tidak ada dengan syarat ayah yang harus menentukan laki – laki yang akan menjadi suaminya anaknya itu, mewasiatkan untuk memilih suami anaknya, maharnya tidak boleh lebih rendah dari mahas mitsil dan suai yang dipilhkan itu bukan orang yang fasik.

3. Mazhab Syafi'i

- a. Ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas
- b. Pemilik hamba sahaya

4. Mazhab Hanbali

- a. Ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas
- b. Anak laki – laki sampai ke bawah
- c. Saudara laki – laki kandung
- d. Saudara laki – laki seayah

- e. Anak laki – laki dari saudara laki – laki sekandung dan seayah
- f. Paman, kemudian anak laki – laki paman
- g. Paman ayah

Menurut Al Qurtubiy (salah satu pengikut Malikiyah) memberi hak luas kepada wali sehingga perempuan dewasa asalkan masih perawan dapat dinikahkan tanpa harus meminta persetujuannya. Meminta izin kepada perempuan yang di dinikahkan hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib, sekalipun dengan lelaki sekufu.¹⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa adanya wali adalah sesuatu yang harus ada, ini berlandaskan kepada al qur'an yaitu di dalam Surah An nur ayat 32 dan Al Baqarah ayat 221 dan ayat 232 yang ditunjukkan kepada wali untuk menikahkan orang yang tidak bersuami atau beristri. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa wali itu harus ada apalagi di perkuat dengan hadist yang diriwayatkan Aisyah dari hadis Aisyah dapat dipahami bahwa izin seorang wali itu sangat diperlukan dan pada umumnya wanita yang menikahkan dirinya sendiri itu tanpa izin walinya. Dari dalil-dalil diatas sudah jelas bahwa perkawinan diserahkan kepada mereka bukan kepada wanita itu sendiri.

Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra yang menurut mazhab Hanafi itu adalah hadis ahad yang Shahih sebenarnya diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Sunannya juz 3 halaman 2083, Tirmidzi dalam kitab sunannya juz 3 halaman 1102, Ibnu Majah juz 1 halaman 1879 , ad – Darimi juz 2 halaman 2148, Ahmad dalam kitab musnadnya juz 6 halaman 47,165, Syafi'I nomor 1543, Ibnu Abi

¹⁷ Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdullah bin Muhammad al-Qurtubi, *Mawsu'ah Fiqh al-Malik* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 231-234.

Syaibah 4/128, Abdur Razzaq nomor 10472, Abu Daud ath – Thayyalisi dalam kitab musnadnya nomor 1463, ath – Thahawi juz 2 halaman 4, Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya juz 6 halaman 4062, ad – Dara Al – quthni dalam kitab As Sunan juz 3 halaman 221 , Ibnu Jarud nomor 700, al – Hakim dalam kitab Al Mustadrak juz 2 halaman 168, al Baihaqi dalam kitab As Sunan juz 7 halaman 105, al – Baghawi dalam Syarh Sunnan juz 9 halaman 39 dari beberapa jalur yang banyak sekali dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi.

Hadist tersebut adalah shahih tiada keraguannya, walaupun ada terdapat di dalam riwayat Ahmad juz 6 halaman 47 telah menceritakan kepada saya Ismail, telah menceritakan kepada saya Juraij, ia berkata telah mengabarkan kepada saya Sulaiman Musa...dengannya. Ibnu Juraij berkata: maka saya menemui Az – Zuhriy, lalu saya menanyakan kepadanya tentang hadits ini? Dia tidak mengetahuinya, ia berkata, adalah Sulaiman bin Musa adalah ia yang menceritakan kepada saya tentang haditsnya, para pentahqiq menolak pembicaraan yang disebutkan itu, dikarenakan Sulaiman ini adalah orang yang tsiqah (dipercaya) dengan persaksian Az Zuhry sendiri kemudian ia lupa, sebagaimana yang terjadi hal demikian pada selainnya. Maka tidaklah diperbolehkan menolak hadits dengan kelupaan Az Zuhry, padahal Sulaiman menghafalnya, terlebih lagi ia tidak bersendiri dengan haditsnya darinya.¹⁸

Banyak dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa hadis ini shahih seperti Ibnu Hibban, Ibnu Jarud, Abu Awanah, Yahya bin Ma'in yang mengatakan

¹⁸ Abu Zakariya, *Fiqh Islam dari Al Kitab dan Al Sunnah* (Jakarta : Griya Ilmu, 2012)h. 296

bahwa hadist yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yahya adalah hadis shahih, Ibnu Jauzi berkata dalam *At Tahqiq* juz 3 halaman 71 yang mengatakan “hadis ini shahih, seluruh rawinya adalah perawi yang shahih “, Az – Dzahabi juga mengatakan hadits ini shahih dalam *Tanqiq Tahqiq* juz 8 halaman 270, Al Hakim juga berkata hadits shahih menurut syarat Bukhari Muslim.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa hadis yang dibawakan oleh Aisyah ra bisa dijadikan dalil hujjah karena dinyatakan shahih tanpa ada kelemahannya. Imam Nawawi (pengikut Syafi’iyah) berpendapat bahwa seorang wali adalah kunci sahnya suatu pernikahan, apabila ada seorang wanita yang menakadkan dirinya sendiri maka akad nikahnya tidak sah. Alasannya adalah perempuan adalah sempit pemikiran dan mudah tertipu dan selain itu menikahkan adalah haknya seorang wali.¹⁹

Menurut Ibnu Qudamah dari Madzhab Hanabillah juga menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan dan seorang perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri atau orang lain serta tidak boleh mewakilkan kepada selain dari walinya. Dan untuk mencegah dari kerusakan, maka kehadiran wali sangat diperlukan. Ibnu Qudamah lebih mengutamakan dalil yang bersifat umum ketimbang yang bersifat khusus, beliau berpendapat bahwa hadis yang menyatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali itu bersifat umum

¹⁹ Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz XVI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 146

sedangkan hadis yang menyatakan cukup dengan izin walinya saja itu adalah hadis yang bersifat khusus.²⁰

Menurut penulis, apabila membandingkan kondisi perempuan – perempuan di Bagdad yang sudah di paparkan sebelumnya dengan kondisi saat ini tidak jauh berbeda. Di zaman sekarang antara laki – laki dan perempuan hampir sudah tidak ada jarak lagi. Mereka bekerja bersama, belajar bersama dan hampir semua aktifitas sekarang selalu bercampur antara laki – laki dan perempuan. Melihat kondisi itu padahal mereka mampu untuk memilih pasangan mereka dan menikahkan diri mereka sendiri. jika dilihat dari segi kemandirian Menurut penelitian Masrun dkk(1986) pada suku Jawa ternyata tidak ada perbedaan kemandirian yang signifikan antara laki – laki dan perempuan, bahkan ada kecenderungan perempuan lebih mandiri. Kemandirian yang dimaksud disini ada lima yaitu 1. inisiatif yaitu kemampuan dalam berpikir dan bertindak secara original dan kreatif, 2. bebas yaitu tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena orang lain dan tidak tergantung kepada orang lain, 3. Progresif dan ulet yang ditunjukkan dengan adanya usaha untuk mengejar prestasi yang mendasarkan pada harapan – harapan yang riil, 4. Kemantapan diri yaitu mencakup aspek percaya diri, 5. Pengendalian diri dalam yaitu perasaan mampu mengatasi masalah yang dihadapi.²¹

²⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 337-339

²¹ Faturachman “Kemandirian Pria Wanita Seimbang” (lapora hasil penelitin di Puslit Kependudukan UGM)h. 2

Walaupun dikatakan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki – laki, tetapi sudah menjadi kodratnya bahwa serang laki – laki merupakan pemimpin dan pelindung perempuan, seperti firman Allah SWT dalam surah An – Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ٣٤

”34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain.....”

Menurut Ahmad Husnan ada perbedaan antara perempuan dan laki – laki yaitu dalam hal kekuatan, keberanian, dan wawasan. Dikatakan bahwa tingkat penguasaan pria terhadap ketiga hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut membuat laki – laki lebih bertanggungjawab daripada perempuan. Sehingga serang laki- laki dapat dijadikan pelindung bagi perempuan dari segala gangguan yang mungkin timbul. Keadaan seperti inilah yang juga membuat perempuan membutuhkan wali nikah dalam melangsungkan pernikahan, sebab seorang laki – laki yang menjadi walinya akan ikut bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul dengan dilaksanakannya pernikahan.²²

Kalau kita cermati, ayat al qur’an dan hadis yang mengharuskan adanya wali itu bertujuan untuk melindungi kaum wanita, sebab wanita sesuai kodratnya sebagai makhluk yang lemah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perkawinan dengan suami yang tidak bertanggungjawab. Disisi lain alasan mengapa seorang wali itu harus ada karena sejak di kandung, dilahirkan sampai dewasa, seorang

²² Ahmad Husnan, *Hukum keadilan antara wanita dan laki – laki* (Solo: Al Husna) h.61 – 62

anak banyak memerlukan pengorbanan orang tuannya sehingga tidak sepatutnya apabila seorang anak ingin membangun sebuah rumah tangga tetapi meninggalkan orangtuannya. dan akad yang dilakukan oleh wali kepada mempelai laki – laki ini bisa dilambangkan sebagai akhir tugas dari seorang orang tua untuk memenuhi kebutuhan materil dan spiritual anak gadisnya yang sekarang beralih kewajibannya kepada suaminya. Karena peralihan kewajiban itu yang secara langsung dilakukan oleh wali perempuannya maka akan bisa memunculkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab yang besar untuk bertindak sebagai suami yang bisa membahagiakan istrinya. Hadirnya wali juga bisa mempengaruhi psikologis sang perempuan yaitu wali seorang wali bisa saja memberikan kekuatan batin baginya dan bisa memberi dorongan untuk membina rumah tangga sendiri. Selain itu, bisa saja menentramkan hatinya. Maksudnya adalah meskipun dia telah berumah tangga dia akan tetap berhubungan baik dengan orangtuannya. Munculnya rasa tanggungjawab yang besar dari sang suami dan hubungan yang baik dengan orang tua pasti akan mendorong terwujudnya keluarga yang bahagia.

Menurut penulis juga mungkin karena adanya wali dalam pernikahan membawa banyak manfaat bagi wanita maka dari itu di Indonesia mewajibkan adanya wali dalam pernikahan seperti di dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 19 yang berbunyi “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan pendapat tentang wali nikah dan Faktor Perbedaan Pendapat:

Aspek	Persamaan	Perbedaan	Faktor Perbedaan
-------	-----------	-----------	------------------

Rukun Nikah	Empat Mazhab menjadikan Wali dalam rukun perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanafi : Apabilla mahar kurang dari mahar mitsil, anak kecil, dan gila atau setengah gila. • Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali: Wali mutlak menjadi rukun nikah baik gadis maupun janda, kecil maupun dewasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanafi Rukun Nikah hanyalah dua ijab dan qabul, dan pelaku pernikahannya itu adalah wanita itu sendiri. • Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali Wali nikah adalah rukun pernikahan, apabila tidak ada wali dalam pernikahan maka nikahnya dianggap batal.
Dalil yang digunakan	Empat Mazhab menggunakan ayat al qur'an dan hadits	<ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanafi: Q.S Al Baqarah ayat 230, 232, dan 234 <p>Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim</p> <p>الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا</p> <p>Bahwa Rasulullah telah bersabda: wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penafsiran ayat - Mazhab Hanafi : Menafsirkan Q.S Al Baqarah ayat 232 adalah ayat yang menunjukkan bahwasannya seorang wali tidak boleh mencampuri dalam masalah perkawinan apabila anak perempuannya sudah suka. - Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali Menafsirkan Q.S Al Baqarah ayat 232 yaitu ayat yang menjelaskan bahwasannya tidak sah pernikahan tanpa wali.
		<p>Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali</p> <p>Q.S Al Baqarah ayat 221,dan ayat 232, An Nuur ayat 32</p> <p>Hadiits diriwayatkan oleh Aisyah</p> <p>عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الْخَمْسَةَ إِلَّا السَّائِي</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Hadits Mazhab Hanafi menganggap hadits yang digunakan oleh Mazhab yang tiga (Mazhab Maliki, Mazhab Syafi;i dan Mazhab Hanbali) adalah hadits ahad dan di dalam metode istinbath hukum, Mazhab Hanafi hanya menggunakan hadits yang mutawatir. Bisa saja menggunakan hadits yang ahad tetapi harus memenuhi syarat hujjah. Sedangkan hadits ahad yang dinilai Mazhab Hanafi disini adalah

		<p>“Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurnya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. [HR. Khamsah kecuali Nasai]</p>	<p>hadits yang tidak memenuhi syarat hujjah. Mengenai hadits yang digunakan Mazhab Hanafi makna dari الأَيِّم adalah wanita yang tidak bersuami baik gadis maupun janda, tetapi menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Hanbali makna الأَيِّم adalah seorang janda. Kemudian berkenaan dengan lafaz أَحَقُّ بِنَفْسِهَا menurut Mazhab Hanafi, seorang wanita bebas melakukan akad apapun bahkan akad nikah sekalipun. Sedangkan Mazhab yang lainnya mengartikan bahwa lafaz itu berkenaan dengan seorang janda yang boleh untuk menerima atau menolak lamaran seseorang.</p>
Istinbath Hukum	1. Sumber Hukum Empat mazhab menggunakan Al Qur’an sebagai sumber utama kemudian Hadits	<p>1. Mazhab Hanafi : Menambahkan qiyas dalam menggali hukum</p> <p>2. Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali Tidak menggunakan qiyas</p>	<p>1.Mazhab Hanafi : Menggunakan pendekatan makna sebagai cara penggalan hukum yang penarikan hukumnya memerlukan metode lain yaitu qiyas.</p> <p>2.Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I dan Hanbali Menggunakan pendekatan lafaz dalam menggali dalilnya dan tidak memerlukan lagi metode yang lainnya.</p>
	2.Berilat hukum	<p>1.Mazhab Hanafi Menyamakan gadis dewasa dengan janda dan menjadikan dewasa sebagai ukurnya</p> <p>2.Mazhab Maliki,Mazhab Syafi’I,dan Mazhab Hambali Gadis maupun janda sama – sama dihukumi gadis</p>	<p>Keadaan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Mazhab Hanafi berkembang di daerah Kufah yang letaknya Jauh dari Madinah dan kurang pembedaharaan hadis. Sedangkan mazhab Maliki Mazhab Syaf’i dan Mazhab Hanbali berkembang di daerah yang dekat dengan Kota Madinah</p>